
Peranan Gedung Agung Sebagai Ibu Kota NKRI Pada Tahun 1946-1949

Stephanus Tri Hartono¹⁾, Sumaryoto²⁾, & Taufik³⁾
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia¹⁾

ABSTRACT

The aim of the research is to find out the history of the construction of the Great Building; To find out the security situation of the city of Jakarta after the proclamation; To find out the reasons for Soekarno Yogyakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia; To find out how the role of Gedung Agung Yogyakarta as the capital (State Palace) during the revolution from 1946 to 1949; To find out the process of returning the capital of the Republic of Indonesia to Jakarta. The history of a building or building is very closely related to the occupants or people who occupy the building, the function of the building is very influential on the history of the building. The history of a building will not be meaningful if it only talks about when the building was made, who made it, and how much it cost to build. Thus, the history of the building will carry a long series of history. Starting from this understanding, writing the Role of the Great Building as the Capital City of the Republic of Indonesia in 1946-1949 (Historical Review) only limits the role of the Great Building and the figures who inhabited the building which occurred in 1946 to 1949 which was closely related to the transfer the capital of the Republic of Indonesia to Yogyakarta Gedung Agung as the Presidential Palace.

Key Words: Great Building; as the Capital of the Republic of Indonesia; in 1946 -1949

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui Untuk mengetahui sejarah dibangunnya Gedung Agung; Untuk mengetahui situasi keamanan kota Jakarta setelah proklamasi; Untuk mengetahui alasan Soekarno Yogyakarta sebagai Ibu Kota NKRI; Untuk mengetahui Bagaimana Peran Gedung Agung Yogyakarta sebagai ibu kota (Istana Negara) masa revolusi tahun 1946 sampai dengan tahun 1949; Untuk mengetahui proses kembalinya Ibu Kota NKRI ke Jakarta. Sejarah suatu Gedung atau bangunan sangat erat sekali dengan siapa penguni atau orang yang menempati bangunan itu, fungsi dari pada bangunan itu sangat berpengaruh terhadap sejarah daripada gedung tersebut. Sejarah suatu gedung tidak akan bermakna jika hanya berbicara mengenai kapan gedung itu dibuat, siapa pembuatnya, dan berapa biaya pembangunan gedung tersebut. Dengan demikian maka sejarah gedung tersebut akan mem bawa rentetan sejarah yang panjang. Bertolak dari pengertian ini penulisan Peran Gedung Agung Sebagai Ibu Kota NKRI pada tahun 1946-1949 (Tinjauan Historis) hanya membatasi peranan Peran Gedung Agung dan serta tokoh-tokoh yang menghuni bangunan tersebut yang terjadi pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1949 yang berkaitan erat dengan pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta Gedung Agung sebagai Istana Kepresidenan.

Kata Kunci: Gedung Agung; sebagai Ibu Kota NKRI; pada tahun 1946 -1949

Penulis Korespondensi: (1) Stephanus Tri Hartono (2) Universitas Indraprasta PGRI , (3) TB. Simatupang,, Jakarta, dan Indonesia, (4) Email: joffandis@gmail.com

Copyright © 2021. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah suatu Gedung atau bangunan sangat erat sekali dengan siapa penguni atau orang yang menempati bangunan itu, fungsi dari pada bangunan itu sangat berpengaruh terhadap sejarah daripada gedung tersebut. Sejarah suatu gedung tidak akan bermakna jika hanya berbicara mengenai kapan gedung itu dibuat, siapa pembuatnya, dan berapa biaya pembangunan gedung tersebut. Menurut Tashadi dkk (1985: 1) Gedung atau bangunan itu akan lebih berarti dan bermakna apabila sejarahnya dikaitkan dengan para penghuni atau yang pernah menghuninya; artinya, di samping diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung tersebut, diceritakan pula tentang apa dan bagaimana peranan para penghuni atau yang pernah menghuni serta orang-orang yang berhubungan erat dengan bangunan tersebut. Dengan demikian maka sejarah gedung tersebut akan membawa rentetan sejarah yang panjang dan bermakna.

Menurut pusat sejarah TNI (11 Mei 2019) Pada akhir 1945 situasi kota Jakarta menjadi sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)-Belanda kembali membuka kantor di bawah kendali H.J van Mook, Belanda bersikeras menguasai ibu kota Republik Indonesia ini kembali. Tindakan penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi.

Menurut M. C. Ricklef (2001: 141) pada bulan Januari 1946, pendudukan kembali oleh Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan ibu kota republik ke Yogyakarta.

Menurut Osman Raliby (1952 : 176) Sementara itu dengan makin tegangnya situasi di Jakarta sebagai akibat konflik yang semakin meruncing antara Pemerintah Republik dengan pasukan Sekutu, pada tanggal 4 Januari 1946 presiden bersama beberapa pejabat tinggi pemerintah pusat pindah ke Yogyakarta.

Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan tersebut antara lain :

1. Soekarno – Hatta diincar oleh pemerintah Belanda untuk diajukan kedepan pengadilan militer sekutu sebagai penjahat perang.
2. Soekarno – Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupan pemersatu bangsa, seandainya kedua pemimpin tersebut ditangkap Belanda maka tidak ada lagi tokoh pemimpin Indonesia yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia seperti halnya Soekarno – Hatta.
3. Gedung – gedung pemerintah di Jakarta banyak digunakan oleh tentara sekutu, sehingga departemen-departemen Republik Indonesia memerlukan tempat yang lebih longgar didaerah.

Dalam bukunya Sastrosatomo, (1087:203) Yogyakarta dipilih menjadi ibu kota Republik Indonesia karena beberapa lasan diantaranya adalah :

1. Yogyakarta yang terletak di Jawa bagian tengah agak ke selatan sehingga cukup jauh dan sulit dijangkau musuh.
2. Hubungan Yogyakarta ke segala penjuru cukup mudah, baik letak transportasi darat maupun udara dan sarana komunikasi (radio, telegram).
3. Markas besar Tentara (MBT) terdapat di Yogyakarta, dengan Jenderal Soedirman sebagai panglima besar dan Jenderal Urip Sumohardjo sebagai staf umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
4. Disamping itu Yogyakarta juga terdapat markas besar berbagai kesatuan laskar bersenjata salah satunya Laskar Rakyat Mataram oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX
5. Suasana Yogyakarta merupakan daerah yang secara organisasi dan proses demokrasi pemerintahan paling maju dibanding dengan daerah –daerah lain dari seluruh wilayah Republik Indonesia.
6. Sikap dan peranan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam revolusi.

METODE

Menurut Garraghan (1957: 33) metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai berikut: Suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “sinthese” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai.

Karena penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode yang dinamakan metode historis, yaitu suatu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah dengan melalui tahapan tertentu. Menurut Notosusanto (1971:17) menulis Penerapan metode historis ini menempuh tahapan kerja sebagaimana :

1. Heuristik yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau
2. Verifikasi yaitu menyelidiki apakah jejak itu sejatinya isinya
3. Interpretasi yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu
4. Historiografi yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah (historiografi).

Sesuai dengan metode historis tersebut diatas, maka langkah proses dalam penelitian dan penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Heuristik (heuristics) Dalam tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam sumber dan literatur yang sangat berhubungan dengan permasalahan penelitian baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang di dapatkan melalui telaah pustaka.
2. Kritik Sumber (Verifikasi) Dalam kegiatan yang bersamaan itu ada dua kegiatan yang secara langsung dilakukan. Yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Pandangan Notosusanto (1971:20) Kritik sebagai tahapan yang juga sangat penting terbagi menjadi dua yakni intern dan ekstern, beliau menegaskan : Setiap sumber mempunyai aspek intern dan aspek ekstern, aspek eksternnya bersangkutan apakah sumber itu memang sumber, artinya sumber sejati yang dibutuhkan. Aspek internnya bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memeberikan informasi yang kita butuhkan. Karena itu, penulisan sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi ekstern dan intern.
3. Interpretasi, Interpretasi adalah penafsiran mengenai makna fakta dan hubungan antara fakta satu dengan fakta lain. Dalam menafsirkan fakta sejarawan harus dilandasi oleh sikap objektif. Apabila dalam hal bersikap subjektif, ia harus subjektif yang rasional, tidak boleh subjektif yang emosional. Oleh karena itu interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai makna-makna sejarah. Interpretasi dalam penelitian sejarah dalam menginterpretasi sumber-sumber sejarah dalam hal ini sebagai peneliti saya berusaha bersikap objektif dalam mengkaji peristiwa pada angka tahun 1946-1949. Interpretasi yang peneliti lakukan terhadap data-data yang akan dikumpulkan terkait dengan Peran Gedung Agung sebagai Ibu Kota NKRI tahun 1946-1949 adalah berbagai hal yang mendukung hasil penelitian.
4. Historiografi Proses kerja seorang peneliti pada tahap akhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. pada tahap ini peneliti merangkaikan fakta secara kronologis dan sistematis agar menjadi tulisan sejarah. Historiografi yang terencana dalam penelitian Peran Gedung Agung sebagai Ibu Kota NKRI tahun 1946-1949 (tinjauan historis) adalah apa yang ditemukan di lapangan baik itu yang sifatnya penggalian sumber terencana atau sumber lapangan yang diperoleh secara tidak terencana. Dalam hal itu, peneliti menyusun historiografi tanpa batasan Chapter (Sub pembahasan). Sehingga hal ini menjadi alasan (reason) bahwa peneliti tidak memiliki batasan masalah dalam penulisan historiografi.

Prosedur

Metode yang gunakan Penelitian kualitatif jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Tujuan penelitian kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Obyek penelitian yang saya lakukan Peranan Gedung Agung sebagai ibu kota NKRI pada tahun 1946-1949, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022 dengan tahapan sebagai berikut Pengajuan judul bulan Maret, penyusunan proposal bulan Maret, pengajuan proposal bulat maret, pengumpulan data bulan April dan Mei, penafsiran bulan Mei, penulisan hasil penelitian bulan Juni dan Juli, sehingga keseluruhan memerlukan waktu selama enam bulan.

Partisipan

Penelitian Peranan Gedung Agung sebagai ibu kota NKRI pada tahun 1946-1949 ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan berdasarkan penggalian data melalui metode studi pustaka/studi literatur dari beberapa sumber literatur (tertulis). Studi Pustaka Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan

Penulisan dilakukan melalui proses penggalian data dari berbagai sumber rujukan yang membahas berbagai artikel/tulisan, ensiklopedia terkait dengan berbagai literatur mengenai pendekatan kualitatif, terutama yang berkaitan dengan ilmu sejarah khususnya sejarah mengenai peranan Gedung Agung sebagai ibu kota NKRI. Berbagai sumber ini dimuat di media publik, sehingga dapat diakses melalui beragam tempat (perpustakaan) dan media internet secara terbuka.

Tulisan ini dapat menjadi elaborasi dari berbagai artikel dan tulisan yang terkait. Demikian pula, artikel ini lebih merupakan sebuah sintesis dari tulisan-tulisan yang pernah ada, untuk kemudian dilihat dalam hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan dalam konteks saat ini.

Instrumentasi

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri dengan cara kajian pustaka atau dokumen, artikel, dan ensiklopedia. Peneliti menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian ini mampu memenuhi syarat penelitian yang kredibilitas dan reliabilitas.

Dalam kajian penelitian Peranan Gedung Agung sebagai ibu kota NKRI pada tahun 1946-1949 peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menuju standar yang kredibilitas dan reliabilitas sehingga seluruh pembaca dapat mempunyai tafsiran yang sama.

Analisis Data

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dari penelitian Peranan Gedung Agung sebagai ibu kota NKRI pada tahun 1946-1949 dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sehingga hasil dari penelitian ini berupa kegiatan menafsirkan fakta-fakat sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.

HASIL

Istana Yogyakarta sering disebut Gedung Agung untuk membedakan dengan keraton kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang hanya berjarak satu kilometer dari Gedung Agung. Di Gedung Induk, ruang Garuda menjadi ruang pertama sebagai penyambut tamu negara. Di ruangan ini kabinet Republik Indonesia dilantik taklala Ibu Kota negara berada di Yogyakarta, pelantikan Jenderal Soedirman sebagai panglima besar TKR tanggal 3 Juni 1947 dan pelantikan sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang RI tanggal 3 Juli 1947.

Kompas.com (09/06/2019) Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, mempunyai banyak peranan dalam perjuangan bangsa Indonesia maka kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa wajib untuk mengetahui lebih dalam mengenai gedung ini, fakta yang pernah terjadi dalam perjuangan diantaranya :

1. Pernah Menjadi Pusat Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Sejarah Revolusi Indonesia pernah terjadi di Gedung Agung sekitar tahun 1946-1949. Pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno, Mohammad Hatta beserta keluarganya dijemput diam-diam dari Jakarta dan dibawa ke Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibu Kota baru Republik Indonesia dan Gedung Agung menjadi Istana Kepresidenan.
2. Tempat Lahir Megawati Soekarnoputri Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden Soekarno yang saat itu sedang hamil tua, melahirkan Megawati Soekarnoputri pada Januari 1947 di Gedung Agung Yogyakarta.
3. Memiliki Arsitektur Unik Istana Kepresidenan Yogyakarta berdiri di atas tanah seluas 4,2 hektar. Tempat ini berhadapan dengan bekas benteng VOC Fort Vredenburg di tepi jalan Jendral Ahmad Yani. Saat masuk ke pintu gerbang utama, akan terlihat patung raksasa penjaga pintu "Dwarapala" setinggi 2 meter yang berasal dari sebuah biara Candi Kalasan. Juga terdapat Tugu Dagoba (tugu lilin) setinggi 3,5 meter yang terbuat dari batu andesit. Arsitektur bangunan memperlihatkan corak paduan desain lokal dan gaya Eropa. Bagian depan berhiaskan arca Jawa. Gaya Eropa terlihat menonjol pada bangunan Gedung Agung. Terdapat tiang-tiang besar gaya Doria di serambi depan dan ruang makan, cekukan tempat kaca di dinding dan untaian lampu gantung kristal. Perpaduan dengan unsur Indonesia tampak pada hiasan tembok berupa ornamen kain batik Iwan Tirta yang berhadap-hadapan dengan ukiran Jepara di ruang makan VVIP.
4. Saksi Bisu Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Pada masa pemerintahan Belanda, Gedung Agung semula merupakan kediaman resmi residen Belanda ke-18 bernama Anthonie Hendriks Smissaert di Yogyakarta (1823-1825). Pada 1867 saat terjadi gempa bumi, gedung tersebut sempat ambruk, dan dibangun kembali pada 1869. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Agung menjadi kediaman resmi Koochi Zimmukyoku Tyookan, penguasa tertinggi Jepang di Yogyakarta. Ketika Karesidenan Yogyakarta ditingkatkan status administrasinya menjadi provinsi sejak tahun 1927, gedung itu kemudian berubah julukan menjadi Gubernuran atau Loji Gubernur. Gedung itu kemudian berubah julukan menjadi Presidenan ketika Presiden Soekarno dan keluarganya tinggal di sana.
5. Di Gedung Agung Yogyakarta terdapat beberapa ruang penting yakni Ruang Garuda, Ruang Diponegoro, dan Ruang Soedirman. Ruang Garuda merupakan tempat menyambut tamu kenegaraan. Di ruangan ini, Kabinet Republik Indonesia dilantik taklala Ibu Kota negara berpindah ke Yogyakarta. Ruang itu juga dijadikan tempat sidang kabinet, pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (3 Juni 1947) serta pelantikannya sebagai Pucuk Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (3 Juli 1947).

Pada Ruang Soedirman, digunakan untuk mengenang perjuangan Jendral Soedirman saat melawan Belanda. Di ruangan ini pulalah dulunya Jendral Soedirman pamit untuk melakukan perang gerilya. Ruang Diponegoro digunakan untuk mengingat kembali perjuangan Diponegoro saat melawan penjajah. Di ruangan ini digantung lukisan Pangeran Diponegoro yang sedang berkuda.

DISKUSI

Di kisahkan Soebadio Sartro Satomo (1987: 200) Keamanan di kota Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia tempat kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesia tidak dapat dijamin, para tokoh terancam keselamatannya.

Dalam keadaan semakin tidak aman di kota Jakarta ada pertimbangan untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke pedalaman yang lebih aman dan yang di kuasai sepenuhnya oleh Republik. Bung Syahrir mengutus Soebadio Sastro Satomo pergi ke Yogyakarta untuk membicarakannya kemungkinan di pindahkannya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta menyambut baik gagasan ini dan menyanggupi untuk menerima presiden dan wakil presiden berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam Soebadio Sastro satomo (1987: 202) keperluan pindahnya presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta ke daerah yang dikuasai sepenuhnya oleh Republik Indonesia dirasakan sekali karena beberapa faktor:

1. Keamanan pribadi Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh Hatta

Pihak Ekstrimis Belanda tidak segan menculik atau membunuh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh Hatta. Pihak pemerintah Hindia Belanda dan Belanda selalu mempertimbangkan sebagai penguasa yang berhak dan sebagai pemegang kedaulatan atas Indonesia untuk secara resmi menangkap Soekarno-Hatta dengan kemungkinan diajukan ke depan pengadilan militer sekutu sebagai penjahat perang. Terutama tokoh Soekarno-Hatta yang telah dianggap telah mengerahkan tenaga bangsa Indonesia untuk menjadi romusha.

2. Pimpinan bangsa dan pimpinan negara.

Republik Indonesia sebagai perwujudan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, hanya dapat dipertahankan oleh tokoh pemersatu bangsa Indonesia yakni dwitunggal Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh Hatta tidak hanya harus diamankan dari bahaya penculikan dan penangkapan tetapi juga sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia baik dari bahaya luar maupun dari bahaya dalam negeri.

3. Kedudukan Pemerintah Pusat

Sekutu dalam hal ini tentara pendudukan Inggris menduduki dan menguasai gedung-gedung kementerian yang digunakan untuk keperluan tentara pendudukan sehingga kantor-kantor pemerintah pusat harus dipindahkan ke pedalaman. Departemen baru yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Keamanan sudah ditempatkan di Yogyakarta.

Menurut M.C. Ricklefs (2007:441) Daerah Istimewa Yogyakarta daerah yang secara organisasi dan proses demokratisasi pemerintah desa paling maju dibanding dengan daerah-daerah lain dari seluruh daerah Republik Indonesia. Sikap dan peranan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses ini positif maka diputuskanlah Ibu Kota Republik Indonesia di pindahkan ke Yogyakarta sekaligus pindahnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta.

Pada tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, tiba sebuah gerbong dengan ditarik lokomotif secara perlahan. Lampu kereta itu dimatikan agar tidak memantik curiga. "Dengan diam-diam, tanpa bernapas sedikit pun, kami menyusup ke gerbong. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong," kenang Bung Karno. Dimulailah perjalanan menegangkan itu. Pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan gerbong rahasia itu tiba di Yogyakarta dengan selamat. Untuk sementara, kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Jahja yang juga Gubernur Militer Kota Jakarta. Di Stasiun Tugu menjelang subuh, sudah hadir Sultan

HB IX, Paku Alam VIII, dan Jenderal Soedirman, untuk menyambut kedatangan Sukarno dan kawan-kawan. Dan, sejak saat itu, ibu kota RI untuk sementara berada di Yogyakarta.

Istana Kepresidenan Yogyakarta dikenal juga dengan nama Gedung Agung atau Gedung negara. Penamaan itu berkaitan dengan salah satu fungsi gedung utama istana itu, yaitu sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung. Istana ini merupakan salah satu istana dari istana Kepresidenan lainnya, yang memiliki peranan amat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan salah seorang putra Presiden Soekarno, Megawati Soekarnoputri, lahir di istana ini. Istana Yogyakarta sering disebut Gedung Agung untuk membedakan dengan keraton kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang hanya berjarak satu kilometer dari Gedung Agung.

Dalam R. Eddy Soekamto (2009:19) Sejak pindah ke Yogyakarta, tanggal 4 Januari 1946, mulailah babak baru perjuangan mempertahankan Indonesia, dengan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII bersama masyarakat Yogyakarta, memberikan fasilitas milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, untuk mendukung jalannya pemerintahan baik dalam damai maupun kemungkinan terjadinya perang terbuka.

Di samping kementerian baru yaitu Kementerian Penerangan dan Kementerian Pertahanan yang sejak berdirinya berkantor di Yogyakarta, maka dengan pindahnya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta kantor-kantor kementerian di Jakarta yang akhir pada bulan Desember 1945 umumnya telah diduduki oleh sekutu ikut pindah juga ke pedalaman yang tersebar di daerah-daerah. Kementerian dalam Negeri ditempatkan di Purwokerto, Kementerian Kehakiman di Klaten, Kementerian Keuangan sebagian di Magelang, dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagian besar di Purworejo.

Perdana Menteri Syarif sesudah kepindahan Presiden Soekarno ke Yogyakarta menempati rumah Pegangsaan Timur 56 dan sekaligus menjadikannya kantor Perdana Menteri. Sedangkan BPKNIP masih tetap berkantor di Jalan Cilacap 4 Jakarta yang tadinya ditempati bersama-sama oleh kementerian Penerangan dan Kantor Perdana Menteri. Kecuali Amir Syarifuddin, umumnya menteri-menteri tetap tinggal di Jakarta.

Kompas.com (09/06/2019) Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, mempunyai banyak peranan dalam perjuangan bangsa Indonesia maka kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa wajib untuk mengetahui lebih dalam mengenai gedung ini, fakta yang pernah terjadi dalam perjuangan diantaranya :

1. Pernah Menjadi Pusat Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Sejarah Revolusi Indonesia pernah terjadi di Gedung Agung sekitar tahun 1946-1949. Pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno, Mohammad Hatta beserta keluarganya dijemput diam-diam dari Jakarta dan dibawa ke Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibu Kota baru Republik Indonesia dan Gedung Agung menjadi Istana Kepresidenan.
2. Tempat Lahir Megawati Soekarnoputri Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden Soekarno yang saat itu sedang hamil tua, melahirkan Megawati Soekarnoputri pada Januari 1947 di Gedung Agung Yogyakarta.
3. Memiliki Arsitektur Unik Istana Kepresidenan Yogyakarta berdiri di atas tanah seluas 4,2 hektar. Tempat ini berhadapan dengan bekas benteng VOC Fort Vredenburg di tepi jalan Jendral Ahmad Yani. Saat masuk ke pintu gerbang utama, akan terlihat patung raksasa penjaga pintu "Dwarapala" setinggi 2 meter yang berasal dari sebuah biara Candi Kalasan. Juga terdapat Tugu Dagoba (tugu lilin) setinggi 3,5 meter yang terbuat dari batu andesit. Arsitektur bangunan memperlihatkan corak paduan desain lokal dan gaya Eropa. Bagian depan berhiaskan arca Jawa. Gaya Eropa terlihat menonjol pada bangunan Gedung Agung. Terdapat tiang-tiang besar gaya Doria di serambi depan dan ruang makan, cekukan tempat kaca di dinding dan untaian lampu gantung kristal. Perpaduan dengan unsur Indonesia tampak pada

hiasan tembok berupa ornamen kain batik Iwan Tirta yang berhadap-hadapan dengan ukir-ukiran Jepara di ruang makan VVIP.

4. Saksi Bisu Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Pada masa pemerintahan Belanda, Gedung Agung semula merupakan kediaman resmi residen Belanda ke-18 bernama Anthonie Hendriks Smissaert di Yogyakarta (1823-1825). Pada 1867 saat terjadi gempa bumi, gedung tersebut sempat ambruk, dan dibangun kembali pada 1869. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Agung menjadi kediaman resmi Koochi Zimmukyoku Tyookan, penguasa tertinggi Jepang di Yogyakarta. Ketika Karesidenan Yogyakarta ditingkatkan status administrasinya menjadi provinsi sejak tahun 1927, gedung itu kemudian berubah julukan menjadi Gubernuran atau Loji Gubernur. Gedung itu kemudian berubah julukan menjadi Presidenan ketika Presiden Soekarno dan keluarganya tinggal di sana.
5. Di Gedung Agung Yogyakarta terdapat beberapa ruang penting yakni Ruang Garuda, Ruang Diponegoro, dan Ruang Soedirman. Ruang Garuda merupakan tempat menyambut tamu kenegaraan. Di ruangan ini, Kabinet Republik Indonesia dilantik tatkala Ibu Kota negara berpindah ke Yogyakarta. Ruang itu juga dijadikan tempat sidang kabinet, pelantikan Jendral Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (3 Juni 1947) serta pelantikannya sebagai Pucuk Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (3 Juli 1947).

Dengan perlindungan sekutu, Belanda secara diam-diam menyusun kekuatannya untuk menguasai Indonesia kembali. Strategi ini dilancarkan oleh Belanda, karena Belanda ingin berusaha menguasai Indonesia kembali. Dalam aksinya ini, Belanda berhasil menyusun kekuatan-kekuatan yang akan digunakan untuk mengepung wilayah kekuasaan Indonesia. Dengan waktu yang relatif singkat, Belanda dapat menguasai sebagian dari wilayah Indonesia. Kecepatan Belanda dalam menyusun kekuatan ini sangat berpengaruh dengan keadaan di Yogyakarta, karena pemerintah Yogyakarta yang sebagai Ibukota negara belum sempurna dalam mengatur sistem politik dalam negeri. Oleh karena itu dapat dimanfaatkan Belanda untuk menguasai daerah jajahannya.

Pada tanggal 20 September 1945, pasukan Belanda yang dikenal dengan sebutan KNIL mendarat di Semarang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ambarara serta tiba di Magelang bersama rombongan sekutu. Perjalanan Belanda menuju Yogyakarta tinggal selangkah lagi. Belanda mulai berpatroli dengan menggunakan kendaraan Jeep dan Truk yang berisikan serdadu-serdadu KNIL. Kemudian perjalanan dari Magelang dilanjutkan menuju Yogyakarta. Rombongan serdadu-serdadu ini datang ke Yogyakarta dengan mengendarai truk serta jeep dengan mengibarkan bendera Belanda.

Pada bulan Oktober 1945, Belanda mendarat di Yogyakarta mulai menguasai jantung pusta ibu kota. Selain itu juga menguasai tempat-tempat yang akan dipakai hubungan ke luar, misalnya Bandara Udara Maguwo. Dengan penguasaan Belanda yang makin luas wilayah Yogyakarta mengakibatkan pergerakan dari pemuda mulai menyempit. Belanda belum melakukan kegiatan ataupun penyerangan terhadap Yogyakarta, karena Belanda baru akan membangun strategi yang akan digunakan untuk melumpuhkan Yogyakarta sehingga Yogyakarta dapat dikuasai sepenuhnya.

Edelweis Lararenjana (2020.merdeka.com) Setelah pendaratan dan penyerangan oleh pasukan Belanda di Maguwo, Presiden Soekarno, Bung Hatta, Sri Sultan HB IX, dan Sutan Sjahrir segera membentuk sidang kabinet yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pemerintah RI (Presiden dan para menteri) tidak akan meninggalkan Yogyakarta dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta untuk mempermudah mengadakan perhubungan dengan pihak KTN.
2. Bila Presiden dengan anggota kabinetnya di Yogyakarta sampai tertangkap Belanda, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra disertai tugas untuk membentuk dan memimpin Kabinet Darurat atau kalau perlu suatu Pemerintahan RI di Luar Negeri dengan mandat kepada Mr. Maramis (Menteri Keuangan) yang sedang berada di India.

3. Kepada seluruh rakyat RI, Presiden memberi amanat sebagai berikut: Bahwa RI yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus dipertahankan mati-matian. Bila kemerdekaan telah meresap pada jiwa seluruh rakyat RI, mustahil dapat ditindas dengan kekerasan.

Belanda akhirnya berhasil menduduki Kota Yogyakarta dan Istana presiden, sekaligus menawan para pemimpin pemerintahan RI yang berada di sana sebagai hasil agresi pada 19 dan 20 Desember 1948. Kolonel Van Langen, Komandan Tijgerbrigade Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer untuk daerah Yogyakarta juga lantas mendatangi Keraton. Beberapa hari setelah Belanda menduduki Yogyakarta, tepatnya pada 22 Desember 1948, para pemimpin RI mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim ke Brastagi.

Sementara Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Assaat ke Bangka. Para pemimpin RI yang tidak tertangkap meloloskan diri ke luar kota ada pula yang menyamar di dalam kota untuk ikut bergerak di bawah tanah.

Tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan dan tanggal 17 Desember 1949 di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta (bukan di Gedung Negara), Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden RI. Saat itulah Sultan HB IX menyerahkan dana 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan Indonesia kepada Soekarno. Hal itu dikarenakan pemerintah memang belum memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta," kata Sri Sultan saat itu kepada Soekarno sembari menyerahkan selempang cek 6 juta Gulden.

Andre Kurniawan (merdeka.com. Minggu, 27 Desember 2020) Penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda ke Indonesia digelar tiga kali. Pertama, di gelar di Amsterdam, tepatnya di Istana Op de Dam. Wakil Presiden sekaligus perdana menteri, Mohamad Hatta memimpin sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). "Kedua negara (Belanda dan Indonesia) tak lagi saling berlawanan, kini kita berdiri berdampingan," kata Ratu Belanda Juliana kala itu, sesaat setelah naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani.

Penyerahan kedaulatan juga dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan ini dilakukan antara wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia, Tony Lovink, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang bertindak sebagai perwakilan perdana menteri.

Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia inilah, yang akhirnya memutuskan Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Kembalinya Soekarno tersebut, secara otomatis menandai Jakarta sebagai pusat Pemerintahan, setelah sebelumnya pindah di Yogyakarta selama empat tahun.

SIMPULAN

Istana Kepresidenan Yogyakarta bermula dari rumah kediaman resmi seorang Residen Ke-18 di Yogyakarta (1823-1825). Ia seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert, yang sekaligus merupakan penggagas pembangunan Gedung Agung ini. Gedung itu didirikan pada bulan Mei 1824 di masa penjajahan Belanda, dengan arsiteknya bernama A Payen. Dia ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membangun gedung dengan gaya bangunan mengikuti arsitektur Eropa yang disesuaikan pada iklim tropis.

Pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada periode tahun 1755-1927, gedung ini berfungsi sebagai gedung keresidenan, dan pada periode 1927 -1942 gedung ini berfungsi -sebagai gedung gubernuran. Pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945) gedung ini berfungsi •sebagai Zimunukyoku tyookan. dan tempat kediaman koochi,. sedang kan pada masa Republik, gedung ini berfungsi sebagai istana presiden.

Di kisahkan Soebadio Sartro Satomo (1987: 200) Keamanan di kota Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia tempat kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesia tidak dapat dijamin. Di samping telah didaratkannya pasukan Belanda, pemuda-pemuda Ambon dan Indo Belanda yang dipersenjatai oleh pihak Belanda yang hendak mendudukkan kembali kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Kekuatan pasukan Belanda dan Ambon ini di pusatkan pada markas besarnya di daerah Kwitang dan Senen yang terkenal sebagai Batalyon X. Di daerah Kwitang terletak dua markas pemuda dan mahasiswa Indonesia yaitu asrama Prapatan X dan kantor Polisi Republik Indonesia, Prapatan.

Dalam keadaan semakin tidak aman di kota Jakarta ada pertimbangan untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke pedalaman yang lebih aman dan yang di kuasai sepenuhnya oleh Republik. Bung Syahrir mengutus Soebadio Sastro Satomo pergi ke Yogyakarta untuk membicarakannya kemungkinan di pindahkannya Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta menyambut baik gagasan ini dan menyanggupi untuk menerima presiden dan wakil presiden berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam Soebadio Sastro satomo (1987: 202) keperluan pindahnya presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta ke daerah yang dikuasai sepenuhnya oleh Republik Indonesia dirasakan sekali karena beberapa faktor diantaranya Keamanan pribadi Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh Hatta: Pihak Ekstrimis Belanda tidak segan menculik atau membunuh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh Hatta. Pihak pemerintah Hindia Belanda dan Belanda selalu mempertimbangkan sebagai penguasa yang berhak dan sebagai pemegang kedaulatan atas Indonesia untuk secara resmi menangkap Soekarno-Hatta dengan kemungkinan diajukan ke depan pengadilan militer sekutu sebagai penjahat perang. Terutama tokoh Soekarno-Hatta yang telah dianggap telah mengerahkan tenaga bangsa Indonesia untuk menjadi romusha.

Istana Kepresidenan Yogyakarta dikenal juga dengan nama Gedung Agung atau Gedung negara. Penamaan itu berkaitan dengan salah satu fungsi gedung utama istana itu, yaitu sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung. Istana ini merupakan salah satu istana dari istana Keprsidenan lainnya, yang memiliki peranan amat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan salah seorang putra Presiden Soekarno, Megawati Soekarnoputri, lahir di istana ini.

Dipandang dari segi peranan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dari beberapa kediaman resmi presiden, istana di Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting. Istana Yogyakarta ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gedung Agung. Gedung Agung adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia selama tahun-tahun revolusi dan sebagai istana yang pertama, menjadi tempat kediaman seorang presiden Republik Indonesia.

Andre Kurniawan (merdeka.com. Minggu, 27 Desember 2020) Penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda ke Indonesia digelar tiga kali. Pertama, di gelar di Amsterdam, tepatnya di Istana Op de Dam. Wakil Presiden sekaligus perdana menteri, Mohamad Hatta memimpin sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). "Kedua negara (Belanda dan Indonesia) tak lagi saling berlawanan, kini kita berdiri berdampingan," kata Ratu Belanda Juliana kala itu, sesaat setelah naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani.

Penyerahan kedaulatan juga dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan ini dilakukan antara wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia, Tony Lovink, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang bertindak sebagai perwakilan perdana menteri.

Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia inilah, yang akhirnya memutuskan Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Kembalinya Soekarno tersebut, secara otomatis menandai Jakarta sebagai pusat Pemerintahan, setelah sebelumnya pindah di Yogyakarta selama empat tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengemukakan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Roh Kudus Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan jurnal yang berjudul Peran Gedung Agung Sebagai Ibu Kota Nkri Pada Tahun 1946-1949 .

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sumaryoto, selaku dosen Pembimbing Materi dan selaku Rektor Universitas Indraprasta
2. Dr. Taufik M.Hum, selaku dosen Pembimbing Teknik
3. Kepala Musium Gedung Agung Yogyakarta yang selalu memberikan sumber-sumber berita yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
4. Dinas Pendidikan DKI yang telah memberikan ijin kesempatan tugas belajar jenjang S2
5. Kepala Sekolah SMK Negeri 41 Jakarta dan seluruh Manjemen yang selalu memberikan motivasi
6. Istri dan anak-anak yang selalu memotivasi

REFERENSI

- Dianasari,R.(2021). *RRI Yogyakarta Masa Pendudukan Belanda Hingga Masa Revolusi*.Yogyakarta: yayasan lembaga gumun Indonesia
- Dwi Putro Hermawan. (2018). *Revolusi kemerdekaanIndonesia 1945-1949*. Pontianak: Derwati Press
- Djoko Dwiyanto. (2009). *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan*.Yogyakarta : Paradigma Indonesia.
- Eddy Soekanto.R.(2009). *Yogyakarta Ibu Kota perjuangan*. Yogyakarta:Narasi
- Garraghan .S.J.& Gilbert.J.A.(1981). *Guide To Historical Method* .London:Macmillan Education LTD
- Heijboer, Pierre. (1998). *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Jakarta : Grasindo.
- Habibi Muttaqin. (2019). *Peran Radio Rimba Raya dalam Mempertahankan NKRI 1945-1949*. IKAPI: Jawa Timur
- Kuntowijoyo.(1995).*Pengantar Ilmu Sejarah* .Yogyakarta:Tiara
- M.C. Ricklef.(2007).*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta:Serambi
- Notosusanto,N.(1971).*Norma-norma Dasar Penelitian dan penulisan Sejarah*.Jakarta: Pusat Sejarah ABRI
- Osman Raliby, (1952) .*Dokumen Sejarah Indonesia 17Agustus1945 - 31Desember1946*, Jakarta,
- P.J. Suwarno. (1993). *Pengaruh Keraton Yogyakarta Terhadap Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta : FPIPS Sanata Dharma.
- Sri Endang Sumiyati.(2001). *Pelurusan Sejarah Serangan Oemom 1 Maret 1949* ,Yogyakarta: Media Presindo
- Soebadio Sastrosatomo.(1987).*Perjuangan Revolusi*.Jakarta:Pustaka Sinar Harpan
- Suhartono W.P. (2002). *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949*. Yogyakarta : Yayasan Soedjatmoko.
- Sutrisno Kutoyo. (1996). *Sri Sultan Hamengkubuwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya
- Soebagijo I.N. (1953). *Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Surabaya : Panjebar Semangat.
- Tashadi dkk.(1985) . *Gedung Agung Yogyakarta (Istana Kepresidenan di Yogyakarta)* Jakarta:Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

- Tashadi. (1991). *Sejarah revolusi kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Nugraha J. (2020, Desember 28). *Kembalinya Presiden Soekarno ke Jakarta*. Desember 28, 2020, from <https://www.merdeka.com/jateng/peristiwa-28-desember-kembalinya-presiden-soekarno-ke-jakarta-klm.html>
- Kurniawan A. (2020 Desember 27). *Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda* Minggu. Desember 27 2020. 05:30, from <https://www.merdeka.com/jabar/sejarah-27-desember-pengakuan-kemerdekaan-indonesia-oleh-belanda-klm.html?page=5>
- Nur Rohmi Aida. (2019 Juni 09) *5 Fakta Tentang Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta* Kompas.com. Juni 09 2019. 07:39, from <https://travel.kompas.com/read/2019/06/09/073931427/5-fakta-tentang-istana-kepresidenan-gedung-agung-yogyakarta?page=all>.
- Mardani. (2013 Januari 26) *Kebaikan Sultan HB IX saat Ibu Kota pindah ke Yogyakarta Januari 26 2013*. 08:52, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kebaikan-sultan-hb-ix-saat-ibu-kota-pindah-ke-yogyakarta.html>
- Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Yogyakarta Kembali Lagi Ke Jakarta*. (2019 Mei 11). <https://sejarah.tni.mil.id/2019/05/11/sejarah-pemindahan-ibu-kota-republik-indonesia-dari-jakarta-ke-yogyakarta-kembali-lagi-ke-jakarta/>
- Defianti Ika. (2021 Januari 4). *Hari Ini 75 Tahun Lalu, Yogyakarta Resmi Jadi Ibu Kota RI Januari 4 2021*. 7.33, from <https://www.liputan6.com/news/read/4448043/hari-ini-75-tahun-lalu-yogyakarta-resmi-jadi-ibu-kota-ri>
- Wirayudha R. (2015 Juni 29). *Peristiwa Yogya Kembali, Pintu Kebebasan RI dari Cengkeraman Belanda* Juni 29 2015 07.7, from <https://nasional.okezone.com/read/2015/06/29/337/1172885/peristiwa-yogya-kembali-pintu-kebebasan-ri-dari-cengkeraman-belanda>
- Setiyono B. (2010 April 19). *Kembali ke Jakarta April 19 2010*, from <https://historia.id/urban/articles/kembali-ke-jakarta-P4mm6/page/2>
- Desca Lidya Natalia. (2017 November 5). *Mengenal Istana Kepresidenan - Cerita revolusi dari Gedung Agung*. November 5 2017 10.23, from <https://www.antarane.ws.com/berita/662955/mengenal-istana-kepresidenan-cerita-revolusi-dari-gedung-agung>
- Ensiklopedia bebas .(2022 Januari 15) *Gedung Agung*. Januari 15 2022 07.56, from https://id.wikipedia.org/wiki/Gedung_Agung
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2018, from https://www.setneg.go.id/baca/index/istana_yogyakarta
- Ensiklopedia bebas.(2021 Desember 13) *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. 13 Desember 2021, pukul 23.12. From https://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia
- Liputan Enam (2019 September 5). *Menengok Perjalanan Sejarah Ibu Kota RI* September 5 2019 06.32, from <https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengok-perjalanan-sejarah-ibu-kota-ri>
- Ayu Isti Prabandari (2021 Januari 4). *Sejarah 4 Januari 1946: Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta*. Januari 4 2021 05.50, from <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-4-januari-1946-ibukota-ri-jakarta-pindah-ke-yogyakarta-klm.html?page=6>